

AKUNTANSI UNTUK *CULTURAL HERITAGE ASSETS*: INTERAKSI SIMBOLIK TERHADAP AKUNTABILITAS DAN KEBERLANJUTAN ASET BUDAYA DALAM UPACARA GAUKANG TU BAJENG

Muhammad Ashar¹⁾, Annesa Tasya Maghfirah²⁾, Darwis Said³⁾, Alimuddin⁴⁾

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia^{1,2,3,4)}
e-mail: asharacca70@gmail.com¹⁾, annesatasya@gmail.com²⁾, darwissaid@fe.unhas.ac.id³⁾,
alimuddin@fe.unhas.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik akuntansi budaya dalam Upacara Gaukang tu Bajeng dengan mengungkap makna simbolik dan nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk mekanisme akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan masyarakat Bajeng di Gowa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif interpretif dengan pendekatan interaksionisme simbolik. Lokasi penelitian berpusat di Bajeng dengan melibatkan pemuka adat, tokoh masyarakat, pewaris pusaka, serta warga yang terlibat aktif dalam prosesi ritual yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui lima tahapan: deskripsi naratif, analisis proses interaksi, pemaknaan simbol, kategorisasi tema, serta analisis mind, self, and society. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaukang tidak hanya berfungsi sebagai pusaka sakral, tetapi juga sebagai medium simbolik dan sosial tempat praktik akuntabilitas dijalankan dan nilai budaya diwariskan. Penghormatan spiritual terhadap pusaka, ritual kolektif, serta mekanisme pembiayaan partisipatif mencerminkan nilai pengabdian, solidaritas, dan tanggung jawab komunal. Nilai-nilai ini mempengaruhi cara komunitas mengorganisasi, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan, melampaui praktik akuntansi teknis, serta merepresentasikan makna bersama dan legitimasi budaya..

Kata kunci: Aset Warisan Budaya; Interaksi Simbolik; Gaukang tu Bajeng

Abstract

This study aims to explore cultural accounting practices in the Gaukang tu Bajeng Ceremony by uncovering the symbolic meanings and values of local wisdom that shape the accountability mechanisms and financial sustainability of the Bajeng community in Gowa. This study uses a qualitative interpretive methodology with a symbolic interactionism approach. The research location is centered in Bajeng, involving traditional leaders, community leaders, heirs of heirlooms, and residents actively involved in the ritual procession selected through a purposive sampling technique. Data collection was conducted through non-participatory observation, semi-structured interviews, and documentation. Data analysis was conducted through five stages: narrative description, analysis of interaction processes, interpretation of symbols, categorization of themes, and analysis of mind, self, and society. The results show that Gaukang not only functions as a sacred heirloom, but also as a symbolic and social medium where accountability practices are carried out and cultural values are inherited. Spiritual respect for heirlooms, collective rituals, and participatory financing mechanisms reflect the values of devotion, solidarity, and communal responsibility. These values influence how communities organize, allocate, and account for financial resources, transcending technical accounting practices and representing shared meaning and cultural legitimacy.

Keywords: Cultural Heritage Assets; Symbolic Interactionism; Gaukang tu Bajeng

1. PENDAHULUAN

Pelestarian warisan budaya semakin memperoleh pengakuan dalam beberapa dekade terakhir, terutama sebagai bagian integral dari pembangunan lokal yang berkelanjutan (Cerreto & Giovene di Girasole, 2020). Kesadaran akan manfaat material dan immaterial yang diberikan warisan budaya kepada masyarakat semakin meningkat. Warisan budaya tidak hanya memperkuat identitas lokal, rasa memiliki, dan kohesi sosial (Clark, 2006), tetapi juga berperan sebagai modal sosial (Sacco *et al.*, 2014) yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Rodgers & Van Oers, 2011). Oleh sebab itu, warisan budaya mengandung nilai luhur yang patut dilindungi serta diwariskan kepada generasi mendatang (Bambagiotti Alberti *et al.*, 2016), sekaligus menjadi sumber solusi sosial dan kultural yang relevan bagi komunitas.

Dalam konteks akuntansi, pelestarian warisan budaya menuntut peran penting sistem pelaporan. Informasi akuntansi mampu menjadikan suatu realitas sosial menjadi “nyata” melalui proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang mendukung observasi, pemantauan, serta pengendalian (Hopwood, 1988). Namun, paradigma akuntansi keuangan konvensional dibangun di atas logika ekonomi dan pengukuran moneter, sedangkan warisan budaya lebih terkait dengan nilai estetika, sosial, dan kultural. Upaya kuantifikasi terhadap dimensi budaya, lingkungan, pendidikan, dan historis seringkali menghadapi kendala dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (Carnegie & Wolnizer, 1995; Hooper *et al.*, 2005). Selain itu, keterbatasan standar pelaporan dan ketidakberpihakan penyusun standar turut memperlumut pencatatan *cultural heritage assets*. Alih-alih dipandang sebagai sumber manfaat ekonomi, warisan budaya sering lebih tepat diperlakukan sebagai kewajiban pemerintah untuk menjaga dan memeliharanya (Barton, 2000).

Standar internasional seperti IPSAS belum menyediakan pedoman memadai untuk pelaporan *cultural heritage assets*, sehingga SAP yang mengadopsinya hanya memperlakukan warisan budaya sebagai aset fisik, dan laporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya relevan bagi publik (Aversano *et al.*, 2020). Di sisi lain, dalam ekonomi pariwisata modern, warisan budaya sering dikomodifikasi untuk kepentingan ekonomi, terutama melalui dorongan UNESCO, namun komodifikasi yang tidak hati-hati dapat menggeser makna asli, merusak nilai kultural, dan mengabaikan kapasitas masyarakat lokal merepresentasikan identitasnya (Ranasinghe & Cheng, 2018; Yamashita, 1994; Li *et al.*, 2019; Cole, 2008), menunjukkan ketegangan antara pendekatan ekonomi dan pelestarian nilai budaya.

Akuntansi tidak sekadar instrumen teknis, tetapi juga praktik budaya yang membentuk persepsi, bahasa, dan prioritas masyarakat (Hopwood, 1988), dan pergeseran menuju *integrated value reporting* mencerminkan kesadaran untuk mengakomodasi aspek nonmoneter dalam pelaporan warisan budaya (Ellwood & Greenwood, 2016). Praktik pelaporan budaya berperan penting dalam membangun memori kolektif dan identitas sosial (Bleibleh & Awad, 2020), sementara kegiatan partisipatif seperti *Participatory Action Research* memungkinkan masyarakat ikut mengelola warisan, memperkuat modal sosial, dan menjamin keberlanjutan aset. Nilai-nilai kearifan lokal berperan dalam memperkuat tata kelola komunitas melalui integrasi etika, spiritual, dan sosial, meningkatkan transparansi, mencegah kecurangan, serta menjadi dasar penyusunan standar budaya kerja komunitas (Ardiana *et al.*, 2025; Sopanah *et al.*, 2023; Hasan *et al.*, 2022).

Dalam konteks lokal, tradisi Gaukang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang merepresentasikan hubungan erat antara masyarakat dan simbol pusaka sakral. Secara etimologis, kata Gaukang berasal dari bahasa Makassar “gauk” yang mendapat akhiran “ang,” bermakna bekerja atau pengabdian terhadap sesuatu yang sangat dihormati (Arief, 1995). Sejak masa kerajaan-kerajaan lokal, Gaukang dipandang sebagai

media penghubung antara masyarakat dan kekuatan transendental yang diyakini memberikan perlindungan serta kesejahteraan. Dengan demikian, Gaukang tidak sekadar dipahami sebagai benda pusaka, tetapi sebagai representasi nilai spiritual dan kearifan lokal yang menjaga harmoni sosial masyarakat. Dalam praktiknya, upacara Gaukang juga memuat mekanisme akuntabilitas sosial melalui pelibatan kolektif komunitas dalam pengelolaan dan pelestarian warisan budaya tersebut.

Namun, penelitian sebelumnya tentang Gaukang Tu Bajeng lebih banyak berfokus pada aspek sejarah dan budaya. Dengan demikian, dimensi sosial dan simbolik dari praktik akuntansi dalam tradisi Gaukang Tu Bajeng masih jarang diungkap. Padahal, praktik akuntansi berbasis budaya telah berlangsung secara turun-temurun dalam tradisi lokal dan menjadi bagian penting dari mekanisme pelaporan serta pertanggungjawaban kolektif. Kajian akademik yang tersedia cenderung menitikberatkan pada aspek teknis seperti perhitungan biaya atau valuasi *cultural heritage assets* (Aryawati *et al.*, 2023), sehingga makna sosial dan simbolik yang terkandung dalam praktik akuntansi budaya belum tergali secara mendalam. Padahal, dalam berbagai tradisi lokal, pertanggungjawaban finansial sering dilakukan secara kolektif dan partisipatif (Dana & Adnyana, 2025; Ramadhan *et al.*, 2025). Penelitian di Maluku menyoroti akuntansi adat sebagai sarana akuntabilitas ritual (Ilyas *et al.*, 2023), sedangkan pada kesenian Bantengan, akuntansi berperan dalam pelestarian identitas budaya (Sopannah *et al.*, 2024).

Kesenjangan ini membuka ruang penting bagi pendekatan interaksionisme simbolik untuk menjelaskan bagaimana makna sosial dibangun melalui simbol dan interaksi dalam praktik pelaporan *cultural heritage assets* (Shinta, 2024; Kusumaningtyas, 2025; Shafira, 2024; Ikhsano *et al.*, 2024). Interaksi kolektif dalam komunitas membentuk legitimasi sosial dan memperkuat makna budaya yang terinternalisasi dalam praktik akuntansi. Dalam konteks Upacara Gaukang Tu Bajeng, akuntansi atas *cultural heritage assets* perlu dipahami sebagai konstruksi sosial yang sarat simbolisme, bukan sekadar prosedur teknis pencatatan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana praktik pelaporan dan pertanggungjawaban berkontribusi terhadap keberlanjutan budaya.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan literatur dengan mengkaji praktik akuntansi atas *cultural heritage assets* melalui pendekatan interaksionisme simbolik dalam konteks Upacara Gaukang Tu Bajeng. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana interaksi sosial, simbolisme budaya, dan praktik akuntansi membentuk akuntabilitas serta keberlanjutan *cultural heritage assets* dalam konteks masyarakat lokal. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang akuntansi budaya, tidak hanya sebagai alat teknis pelaporan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merefleksikan nilai, identitas, dan legitimasi budaya suatu komunitas.

2. KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Untuk *Cultural Heritage Assets*

Akuntansi berbasis budaya dipahami sebagai praktik pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial serta norma komunitas (Sopannah *et al.*, 2022). Model ini menunjukkan bahwa akuntansi dapat berperan sebagai instrumen pelestarian tradisi dan sarana membangun kepercayaan dalam masyarakat, sejalan dengan temuan bahwa institusi sosial maupun pendidikan dapat menjadi agen utama dalam menginternalisasi nilai keberlanjutan (Leal Filho *et al.*, 2019). Penelitian lain menegaskan bahwa kearifan lokal mampu membentuk kerangka etis yang mengarahkan praktik akuntansi menuju keberlanjutan sosial (Priantara *et al.*, 2024).

Selain itu, penerapan prinsip warisan budaya dalam akuntansi terbukti mampu memperkuat transparansi dan legitimasi dalam pengelolaan sumber daya komunitas (Amaliah *et al.*, 2024). Hal ini sejalan dengan pendekatan pedagogis yang menekankan pembentukan kompetensi keberlanjutan melalui integrasi nilai-nilai etis ke dalam praktik sosial (Lozano dkk., 2019). Dalam konteks Indonesia, akuntansi berbasis budaya sering kali diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem pertanggungjawaban keuangan, misalnya dalam ritual adat atau kegiatan kolektif masyarakat. Nilai-nilai tersebut berfungsi bukan hanya sebagai dasar moral, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengikat praktik akuntansi dengan makna simbolis (Ardiana *et al.*, 2025).

Terdapat dua kelompok besar Heritage, warisan alam (*natural heritage*) dan warisan budaya (*cultural heritage*). Menurut Encyclopædia Britannica Inc (2023), makna heritage (warisan atau penginggalan) adalah tradisi, kinerja, kepercayaan sebagai bagian sejarah bangsa atau sebuah komunitas. Elemen utama budaya adalah simbol, bahasa, norma, nilai dan artefak atau segala hal ciptaan buatan manusia generasi lampau, baik kasad mata (sarana fisik termasuk bangunan) maupun tidak kasad mata (nilai luhur bangsa dan lagu kebangsaan). Berbagai hukum positif NKRI menggunakan istilah warisan budaya berupa benda berwujud dan warisan budaya tak benda (nirwujud), sehingga penulis mengalih bahasa istilah heritage assets menjadi Aset Warisan Budaya (AWB).

Konsep Cultural Assets dalam Akuntansi Publik

Berbagai negara Anglo Saxon dan Eropa memiliki definisi yang berbeda terkait *cultural heritage assets*, sementara organisasi supranasional seperti *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* dan Dewan Museum Internasional turut memberikan penjelasan konseptual. Meskipun telah banyak intervensi yang dirancang untuk mendefinisikan warisan budaya, hingga kini belum ada definisi formal yang diterima secara universal. IPSAS 17 menyatakan bahwa "beberapa aset digambarkan sebagai aset warisan karena signifikansi budaya, lingkungan, atau sejarahnya," dengan memberikan contoh dan karakteristik spesifik. Lebih luas lagi, UNESCO, pada Konvensi 1972 tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, dibedakan antara warisan budaya dan warisan alam: warisan budaya diwakili oleh "monumen, kelompok bangunan, atau situs aset warisan sejarah, estetika, arkeologi, ilmiah, etnologis, atau antropologis" (Pasal 1); warisan alam dapat didefinisikan berdasarkan "karakteristik fisik, biologis, dan geologis yang relevan, serta habitat spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah dan kawasan yang memiliki nilai ilmiah dan estetika khusus" (Pasal 2).

Karakteristik spesifik *cultural heritage assets* menyebabkan tantangan dalam pelaporan akuntansi publik (Rowles, 1992; Carnegie dan Wolnizer, 1999; Barton, 2000). Beberapa ciri khasnya antara lain:

- 1) adanya pembatasan hukum yang melarang atau membatasi penjualan;
- 2) sifatnya yang tidak dapat digantikan dan nilainya yang dapat meningkat seiring waktu meskipun kondisi fisiknya memburuk; dan
- 3) masa manfaat yang sulit diestimasi, bahkan tidak terbatas.

Akibat karakteristik tersebut, pengakuan *cultural heritage assets* dalam laporan keuangan pemerintah menjadi sulit karena nilai pasar seringkali tidak tersedia dan nilai finansial tidak dapat sepenuhnya merepresentasikan manfaat budaya, lingkungan, pendidikan, maupun historis. Dalam dua dekade terakhir, para akademisi (Mautz, 1988; Pallot, 1992; Rowles, 1992) dan penyusun standar internasional (CIPFA, GASB, dan IFAC) telah meneliti perlakuan akuntansi yang tepat untuk *cultural heritage assets*. Christiaens dkk. (2012) menegaskan bahwa klasifikasi suatu pos sebagai *cultural heritage assets* sangat bergantung

pada tujuan pengelolaan pemerintah, apakah untuk kepentingan budaya tanpa orientasi keuntungan atau untuk tujuan ekonomi.

Accountability dan Sustainability Theory

Teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Gray, Owen, dan Adams (1996) memberikan kerangka penting untuk memahami peran pelaporan dan pertanggungjawaban dalam konteks organisasi, masyarakat, maupun budaya. Teori ini menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban untuk menyampaikan informasi finansial kepada pemangku kepentingan, melainkan juga mencakup dimensi moral, sosial, dan politik yang mengikat hubungan antara pengelola sumber daya dan masyarakat luas. Dalam konteks *cultural heritage assets*, teori akuntabilitas memberikan pemahaman bahwa pelaporan keuangan terhadap *cultural heritage assets* tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan kultural terhadap warisan yang dijaga oleh komunitas. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi sosial serta keberlanjutan nilai-nilai budaya di tengah perubahan zaman.

Di sisi lain, teori keberlanjutan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk memastikan kelangsungan nilai dan sumber daya bagi generasi mendatang (WCED, 1987; Bebbington & Larrinaga, 2014). Dalam konteks akuntansi *cultural heritage assets*, penggabungan kedua teori ini memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana pelaporan dan pengelolaan tidak hanya diarahkan pada akuntabilitas jangka pendek, tetapi juga pada pewarisan nilai budaya jangka panjang. Praktik pertanggungjawaban dalam tradisi seperti Upacara Gaukang Tu Bajeng menunjukkan bahwa akuntabilitas komunitas dilakukan secara kolektif dan partisipatif, mencerminkan tanggung jawab lintas generasi untuk menjaga keberlanjutan pusaka sakral serta makna sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya.

Interaksionisme simbolik

Teori interaksionisme simbolik yang berakar dari pemikiran Mead dan dikembangkan Blumer menekankan bahwa tindakan manusia selalu didasarkan pada makna yang dibentuk melalui proses interaksi sosial (Razak, 2023). Relevansi teori ini dalam penelitian budaya terlihat dari bagaimana simbol-simbol adat dipahami bukan sekadar artefak visual, melainkan sebagai konstruksi sosial yang mengandung nilai spiritual, moral, dan sosial yang diwariskan secara turun temurun (Febrianti *et al.*, 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa simbolisme dalam ritual budaya berperan penting dalam memperkuat identitas kolektif dan menjaga struktur sosial komunitas (Campbell *et al.*, 2025). Dalam konteks akuntansi, perspektif interaksionisme simbolik menegaskan bahwa informasi keuangan tidak bersifat netral, tetapi dimaknai secara subjektif sesuai dengan pengalaman, harapan kolektif, dan simbol-simbol sosial yang hidup dalam masyarakat (Haidenthaller, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis interaksionisme simbolik yang berakar pada pemikiran George Herbert Mead dan dikembangkan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Pendekatan ini dipandang relevan karena memberikan kerangka untuk menyingkap konstruksi makna sosial yang terbentuk melalui interaksi simbolik di tengah masyarakat, sehingga praktik akuntansi dalam tradisi Upacara Gaukang Tu Bajeng dapat dipahami tidak semata sebagai aktivitas teknis pencatatan, melainkan juga sebagai representasi nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan relasi simbolik yang mengikat komunitas Bajeng. Fokus penelitian diarahkan untuk menelusuri bagaimana makna, simbol, dan interaksi sosial berperan dalam membentuk mekanisme

pertanggungjawaban dan keberlanjutan *cultural heritage assets* yang diwujudkan melalui pengelolaan dan pelaporan aktivitas keagamaan serta sosial dalam upacara tersebut.

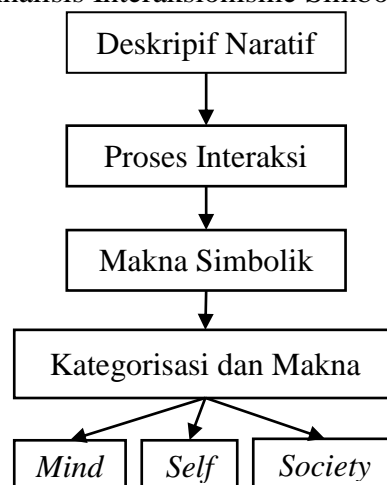
Lokasi penelitian ditetapkan di Bajeng, Kabupaten Gowa, yang menjadi pusat penyelenggaraan upacara adat Gaukang Tu Bajeng. Subjek penelitian terdiri atas 4 (empat) informan kunci yang meliputi pemuka adat, tokoh masyarakat, pewaris pusaka, serta warga yang terlibat aktif dalam prosesi ritual. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan langsung, otoritas budaya, dan pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan Upacara Gaukang Tu Bajeng. Komposisi ini dipandang representatif karena mencerminkan keberagaman peran dalam struktur organisasi budaya lokal, mencakup unsur pengambil keputusan, pengelola administrasi, dan pelaksana kegiatan ritual. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari arsip penerimaan dan pengeluaran dana yang terkait dengan penyelenggaraan upacara. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan data yang konsisten, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses analisis data mengikuti tahapan dalam pendekatan interaksionisme simbolik sebagaimana dirumuskan dalam kerangka Mead dan Blumer, meliputi:

- 1) deskripsi naratif terhadap konteks sosial dan budaya;
- 2) analisis proses interaksi sosial dalam pelaksanaan upacara;
- 3) penafsiran makna simbol yang terkandung dalam praktik akuntansi budaya;
- 4) kategorisasi tema dan makna yang muncul; serta
- 5) analisis terhadap konsep *mind*, *self*, dan *society*.

Kelima tahapan ini membentuk alur analisis yang berkesinambungan dan saling memperkuat, sehingga memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana praktik akuntansi dalam tradisi Gaukang Tu Bajeng tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai media komunikasi sosial dan mekanisme reproduksi nilai budaya, yang menopang keberlanjutan warisan budaya secara kolektif lintas generasi. Alur analisis tersebut divisualisasikan dalam bagan penelitian berikut:

Analisis Interaksionisme Simbolik



Gambar 1. Bagan Tahapan Interaksionisme Simbolik
Sumber : Diolah Peneliti, 2025

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat dan Kedudukan Upacara Gaukang Tu Bajeng

Pada awal Agustus 1945 di Limbung, selain menjalani latihan militer, muncul gagasan strategis dari pemuka masyarakat yang dikenal sebagai “Tu Bajenga”. Gagasan ini bertujuan membangkitkan kembali semangat perjuangan putra-putri Limbung, menanamkan kesadaran akan kewajiban mempertahankan hak, serta menumbuhkan kesiapan berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan wilayah. Sebagai manifestasinya, diputuskan untuk membuka perbendaharaan Tu Bajenga, yaitu sebuah Gaukang yang berisi benda-benda kebesaran kerajaan, termasuk bendera perang sebagai simbol kesiagaan masyarakat. Upacara Gaukang tidak sekadar ritual adat, tetapi juga memiliki makna strategis dan simbolis yang memotivasi perjuangan rakyat Bajeng menghadapi penjajahan.

Wilayah Batang Banoa Appaka, dari 37 desa di Limbung, menjadi pusat strategis dalam pemerintahan lokal dan perjuangan kemerdekaan. Di rumah kebesaran masyarakat Bajeng, atau Istana Balla Lompoa *ri* Limbung, sering dilaksanakan pertemuan untuk menyusun strategi menghadapi penjajah Belanda. Letaknya yang masih dikelilingi hutan menjadikan kawasan ini aman dan strategis bagi pergerakan masyarakat. Pada masa itu, perwira Jepang bernama Fukusima melakukan pendekatan khusus kepada pemuka masyarakat Limbung, dengan strategi berbeda dibanding perwira Jepang lainnya, yang menunjukkan pengaruh kekuasaan asing dalam konteks lokal namun sekaligus meneguhkan semangat patriotik masyarakat (Arfah, 1995).

Puncak dari masa awal kemerdekaan terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, ketika bendera kebesaran rakyat Bajeng, yang dikenal dengan nama *Jole-Jolea*, dikibarkan di depan Istana Balla Lompoa, disertai bendera perang merah, di hadapan puluhan ribu masyarakat yang mengaku sebagai keturunan rakyat Bajeng. Upacara ini menandai kebangkitan semangat juang rakyat Bajeng, terutama para pemuda, sebagai simbol kesiapan mempertahankan hak dan kebenaran (Cora, 2025). Dalam upacara ini, peran Batang Banoa Appaka sangat krusial, karena mereka bertindak sebagai wakil rakyat sekaligus eksekutif wilayah kerajaan Bajeng, mewakili empat daerah perkampungan utama: Limbung, Pammase, Mata Allo, dan Ballo. Pendekatan diplomatis Fukusima terhadap Batang Banoa Appaka menunjukkan bagaimana interaksi kekuasaan luar dengan masyarakat lokal dapat memengaruhi dinamika perjuangan.

Kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai historis, spiritual, dan identitas yang terkandung dalam upacara ini sangat penting agar generasi mendatang dapat memahami, menghormati, dan melanjutkan tradisi ini sebagai warisan budaya yang hidup. Warisan budaya tidak hanya simbol sejarah, tetapi cerminan peradaban dan identitas kolektif, harus dilestarikan sebagai penghormatan terhadap jasa para leluhur dan pejuang (Ngerang, 2025).

Prosesi Upacara *Gaukang* dan *Accera Kalompoang* di Bajeng

Prosesi upacara Gaukang tu Bajeng merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan di halaman Istana Balla Lompoa Bajeng, di mana masyarakat secara kolektif mempersembahkan penghormatan terhadap pusaka Kerajaan Bajeng milik Karaeng Loe Ri Bajeng. Rangkaian upacara ini dimulai dengan ritual persiapan yang dipimpin oleh tokoh adat, dilanjutkan dengan prosesi pembacaan doa, pengirangan pusaka, serta puncak acara berupa pengibaran bendera pusaka (Bendera *Jole-jole*) sebagai simbol identitas dan perlawanan.

Selain itu, terdapat pula ritual *Accera Kalompoang*, yaitu pembersihan dan penyucian benda-benda pusaka kerajaan. Prosesi ini melibatkan tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat setempat yang bersama-sama menjaga kesakralan serta kesinambungan tradisi. *Accera Kalompoang* tidak hanya dipahami sebagai kegiatan simbolis, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan mendalam terhadap leluhur serta penegasan hubungan spiritual masyarakat Bajeng dengan warisan budaya mereka. Dengan demikian, upacara *Gaukang* dan *Accera Kalompoang* bukan hanya sekadar ritus tahunan, tetapi menjadi wahana memperkuat identitas kolektif dan memperdalam makna historis-spiritual masyarakat Bajeng.

Keberadaan benda-benda pusaka kerajaan tersebut hingga kini diyakini memiliki sakralitas dan keramat tertentu dalam pandangan masyarakat (Raodah, 2014). Hanya keturunan kerajaan Bajeng yang disebut *Paerang* berjumlah sekitar 10 sampai 12 orang, salah satunya dari Panciro yang berhak memegang dan mensucikan benda-benda tersebut. Masyarakat umum tidak berani melakukannya karena diyakini dapat menimbulkan konsekuensi spiritual (Ngerang, 2025). Sebelum menyentuh pusaka, para *Paerang* diwajibkan mengambil air wudhu sebagai bentuk penyucian diri. Ritual serupa juga dilakukan oleh seluruh penyelenggara upacara untuk menunjukkan penghormatan terhadap kesakralan *gaukang* (Sijaya, 2025).

Selain *Paerang*, terdapat pula peran penting *Pasussuru'* Bendera yang juga berasal dari keturunan keluarga kerajaan Bajeng. Sama halnya dengan *Paerang*, posisi ini tidak dapat digantikan oleh masyarakat umum. Tugas utama *Pasussuru'* adalah memasukkan bendera kerajaan dan bendera perang ke dalam *bulo banua*, sebatang bambu khusus berukuran sekitar lima meter. Prosesi ini disebut *Assussuru'*. Berbeda dengan upacara pengibaran bendera kemerdekaan, bendera tidak dinaikkan dengan tali, melainkan dimasukkan ke dalam *bulo banua* melalui lipatan kain khusus yang memungkinkan bendera kerajaan dan bendera perang ditempatkan secara sakral di dalam bambu.

Setiap dua tahun sekali, benda-benda pusaka ini diarak menuju *Bungung Barania*, sebuah sumur keramat yang sejak masa Karaeng Loe berfungsi untuk memandikan prajurit Bajeng agar memperoleh keberanian dalam menghadapi musuh. Tradisi ini menegaskan bahwa pusaka kerajaan tidak hanya disakralkan sebagai simbol, tetapi juga diyakini memiliki kekuatan spiritual yang berpengaruh terhadap kesiapan mental dan fisik masyarakat Bajeng (Sijaya, 2025). Tidak semua pusaka dalam Istana Balla Lompoa diturunkan pada setiap upacara. Hanya pusaka tertentu yang dihadirkan, antara lain:

- 1) Bendera; Bendera kerajaan Bajeng berwarna merah dengan ornamen putih yang dikenal sebagai *Jole-Jolea*, serta bendera merah polos berbentuk persegi panjang sebagai bendera perang. Menurut tradisi lisan, jika kedua bendera dikibarkan bersama, hal itu menandakan Bajeng dalam keadaan darurat atau sedang berperang.
- 2) *Poke'* (Tombak). Senjata sakral ini memiliki beberapa jenis, antara lain:
 - a) *Poke' Tubarani*, terbuat dari besi runcing dengan dua varian berbeda dan digunakan sebagai senjata sakti.
 - b) *Poke' Gallang*, berbahan tembaga dan diyakini memiliki bisa mematikan.
 - c) *Poke' Tamannyala*, tombak tembaga paling sakral yang hanya boleh disentuh oleh orang tertentu.
 - d) *Poke' Bonrangang*, berciri ujung lebih lebar dengan sarung kayu berlapis kuningan.
- 3) Tongkat Komando. Terbuat dari kayu berwarna hitam dengan ujung besi runcing, berfungsi sebagai pengawal panglima perang.
- 4) Keris Pusaka *Tu Bajeng*. Keris ini diyakini ditempa hanya dengan pijatan tangan manusia, sehingga bekas telapak tangan masih terlihat hingga kini.
- 5) Lilitan Rambut Raja Bajeng. Rambut raja dililit kain putih dan coklat, disimpan dalam peti, dan diperlihatkan secara terbatas pada saat upacara.
- 6) Tombak Pengawal. Digunakan khusus untuk menjaga raja, dengan gagang kayu dan ujung tembaga runcing.
- 7) *Gallarang Mata Allo*. Senjata bercabang yang diberikan sebagai hadiah ketika seorang tokoh berpindah ke kerajaan Bajeng (Sijaya, 2025)

Tahapan pelaksanaan upacara terbagi menjadi tiga:

- 1) Penurunan Benda Pusaka; Pusaka yang disimpan di loteng Istana Balla Lompoa diturunkan oleh *Paerang*. Beberapa benda asli yang rapuh, seperti bendera *Jole-Jolea*,

kini digantikan dengan duplikat. Prosesi penurunan dilakukan dengan iringan *ganrang* dan disaksikan oleh para tetua adat.

- 2) Pengibaran Bendera *Jole-Jolea*; Setelah diturunkan, *Paerang* menyerahkan bendera kepada *Pasussuru'* untuk dimasukkan ke dalam *bulo banua*. Setelah itu, bendera didirikan di lapangan Istana Balla Lompoa bersebelahan dengan tiang bendera merah putih. Prosesi ini diiringi dengan pembacaan *angngaru'* oleh tokoh adat dari Bontomaero sebelum upacara pengibaran bendera merah putih dimulai.
- 3) Pengiringan ke *Bungung Barania*; Pusaka diarak ke sumur keramat *Bungung Barania* setiap dua hingga tiga tahun sekali, sesuai ketentuan adat. Namun, pelaksanaan prosesi ini bergantung pada situasi dan kondisi yang memungkinkan (Ngerang, 2025).

Identifikasi dan Klasifikasi Aset Warisan Budaya (AWB) Gaukang Tu Bajeng

Identifikasi dan klasifikasi Aset Warisan Budaya (AWB) dalam konteks Upacara Gaukang Tu Bajeng tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan aset tetap dalam akuntansi konvensional. Pendekatan ini mengklasifikasikan aset berdasarkan nilai simbolis, fungsi ritual, dan perannya dalam menjaga legitimasi adat. Berdasarkan observasi awal dan interaksi dengan pemangku adat, AWB Gaukang Tu Bajeng dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

Aset Inti atau Regalia mencakup benda pusaka dengan nilai spiritual dan simbolis tertinggi, seperti Gaukang Tu Bajeng sebagai pusat kosmos, lambang legitimasi adat, dan penghubung dengan leluhur, serta *Jole-Jolea* (bendera pusaka) sebagai simbol perlindungan spiritual, dan *Poke'* (tombak pusaka) yang mewakili wewenang pemangku adat. Interaksi simbolik dengan aset inti ini sangat penting karena mereproduksi identitas kolektif dan menjadi fokus utama pertanggungjawaban ritual.

Aset Pendukung Ritual dan Institusional adalah aset fisik yang mendukung pelaksanaan upacara dan lembaga adat, termasuk Ballalompoa (Rumah Adat) sebagai tempat penyimpanan AWB inti dan lokasi utama upacara, barang pelengkap upacara, serta lahan dan batas adat yang melambangkan wilayah suci dan keseimbangan kosmik. Kondisi aset pendukung menjadi indikator kasat mata dari akuntabilitas fisik pengelola.

Aset Non-Fisik atau Intangible menjadi pondasi keberlanjutan AWB fisik, bergantung pada interaksi sosial dan transmisi budaya. Contohnya adalah *Pattuntung* (aturan adat lisan) sebagai standar akuntansi adat, *Baca-baca* atau doa khusus yang mengaktifkan nilai spiritual AWB inti, dan hubungan *siri'* atau kehormatan kolektif sebagai modal sosial dan mekanisme pengawasan internal. Sistem akuntansi adat ini menekankan bahwa keberlanjutan warisan budaya bergantung pada terpeliharanya makna simbolis aset, melebihi nilai materi.

Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan *Cultural heritage assets*

Berdasarkan penelitian mendalam terhadap pengelolaan aset pusaka Gaukang Tu Bajeng, ditemukan bahwa praktik akuntansi konvensional (berbasis moneter, pengukuran biaya historis, dan kapitalisasi) tidak relevan dan tidak diterapkan secara formal oleh pengelola utama, yakni keluarga besar Kerajaan Bajeng dan Yayasan Istana Balla Lompoa Bajeng. Sebaliknya, praktik akuntansi dalam konteks ini beroperasi secara *de facto* melalui mekanisme akuntabilitas simbolik dan sosial, yang merupakan manifestasi nyata dari Interaksi Simbolik yang mendasari ritual tersebut.

Praktik akuntansi *cultural heritage assets* di Gaukang Tu Bajeng berfokus pada akuntabilitas keberadaan (*existence accountability*) dan akuntabilitas ritual (*ritual accountability*), bukan pada akuntabilitas nilai moneter. Bukti empiris menunjukkan bahwa aset pusaka, yang diidentifikasi sebagai Gaukang, tidak dicatat dalam neraca keuangan Yayasan, tidak mengalami depresiasi, dan tidak pernah dinilai menggunakan standar

akuntansi keuangan (PSAK). Sebaliknya, praktik pelaporan yang sesungguhnya adalah ritual tahunan 14 Agustus. Pelaporan ini mencakup:

- 1) Akuntabilitas Keberadaan: pengeluaran pusaka dari tempat penyimpanan (keris, tombak Tamannyala, dan Bendera Jole Jolea) disaksikan oleh publik dan pejabat, berfungsi sebagai verifikasi periodik bahwa aset masih ada;
- 2) Akuntabilitas Kinerja: ritual Angngaru (sumpah setia) oleh prajurit adat adalah laporan kinerja simbolik bahwa amanat leluhur telah dilaksanakan; dan
- 3) Akuntabilitas Historis: pembacaan narasi sejarah pada setiap upacara berfungsi sebagai laporan naratif yang menegaskan validitas dan signifikansi aset tersebut.

Tabel. 1. Perkembangan Pelaksanaan dan Tantangan dari Tahun ke Tahun

Tahun	Karakteristik Utama Pelaksanaan	Fokus Akuntansi Simbolik
1945	Titik Awal 14 Agustus: Pengeluaran benda pusaka dan pengibaran Bendera Merah Putih dan Bendera Jole Jolea secara berdampingan di Istana Balla Lompoe ri Bajeng.	Akuntabilitas Historis: Menetapkan bukti sejarah perlawanan pra proklamasi.
1946-1960an	Pelaksanaan ritual tahunan berlangsung secara sederhana dan tertutup di lingkungan keluarga kerajaan dan Batang Banoa Appaka. Fokus utama adalah menjaga amanat leluhur dan mengkonsolidasikan semangat perlawanan pasca kemerdekaan.	Akuntabilitas Spiritual: Kepatuhan terhadap ritual dan janji (<i>Angngaru</i>) untuk menjaga pusaka dan kehormatan kerajaan.
1970-1990an	Upacara mulai terinstitusionalisasi sebagai bagian dari perayaan HUT RI, tetapi tetap fokus pada prosesi adat. Partisipasi pemerintah daerah mulai tampak, menyertai elemen tradisional seperti Gaukang dan Angngaru.	Sinkretisme Budaya: Mulai terjadi perpaduan antara ritual adat murni dan seremonial kenegaraan.
2011–2012	Pelaksanaan normal. Upacara tetap mengacu pada prosesi pengibaran dwibendera dan diramaikan oleh pertunjukan budaya lokal, sering kali diselenggarakan oleh keluarga besar Karaeng Loe Ri Bajeng.	Akuntabilitas bergeser ke manajemen penyelenggaraan yang lebih terorganisir.
2013–2016	Peningkatan Skala: Upacara berlangsung lebih meriah (pesta besar orang Bajeng) dengan dihadiri ribuan masyarakat, tokoh adat, dan pejabat. Prosesi diwarnai dengan atraksi tarian tradisional seperti Ganrang Pamanca, Ganrang Pakarena, Tari Salonreng, dan Gandarang Bulo.	Akuntabilitas Publik: Peningkatan <i>exposure</i> media dan publik. Namun, pada periode ini mulai muncul isu berkurangnya jumlah benda pusaka akibat pengambilalihan.
2017	Peringatan Gaukang ke-72. Dilaporkan mengalami hambatan atau terhenti pada pelaksanaannya. Isu ini diperkuat oleh temuan akademis yang mencatat adanya pengurangan benda pusaka pada periode ini, menimbulkan kekhawatiran serius tentang keberlanjutan aset.	Tantangan Fisik Aset: Kegagalan mengamankan pusaka fisik berdampak pada kelancaran ritual.
2019	Peringatan Gaukang ke-74. Pelaksanaan kembali normal dengan kehadiran tokoh adat dan panitia dari Yayasan Istana Balla Lompoe Bajeng. Fokus pada penguatan narasi sejarah dan peran Kerajaan Bajeng.	Akuntabilitas Naratif: Upaya keluarga kerajaan melalui Yayasan untuk mempertahankan dan menyebarkan narasi yang valid.
2020	Peringatan Gaukang ke-75. Pelaksanaan dengan penyesuaian signifikan akibat pandemi COVID-19. Upacara dibatasi, tanpa kehadiran massa besar, pengiringan tarian, atau hiburan publik.	Refleksi Simbolis: Ritual di kembalikan ke esensi sakralnya; penekanan pada nilai historis daripada kemeriahan, memprioritaskan keamanan publik.
2022	Peringatan Gaukang ke-77. Upacara kembali terbuka, dihadiri pejabat dan tokoh seperti Mayjen TNI. Fokus pada pemulihan tradisi dan penegasan kembali bukti sejarah perjuangan Bajeng.	Pemulihan Kepercayaan Publik: Menunjukkan komitmen untuk melanjutkan ritual pasca pandemi.
2023	Peringatan Gaukang ke-78. Pelaksanaan khidmat di Istana Balla Lompoe. Peserta mengenakan pakaian adat khas Sulsel (penekanan visual simbolis). Acara melibatkan pengibaran dwibendera dan pencucian benda pusaka kerajaan.	Penguatan Identitas: Penggunaan pakaian adat massal menegaskan identitas komunal dan kepatuhan pada nilai budaya.
2024	Peringatan Gaukang ke-79. Bendera Merah Putih dikibarkan bersama Bendera Jole Jolea di Istana Balla	Keberlanjutan Ritual: Dikonfirmasi rutin setiap tahun. Yayasan Istana

	Lompoa Bajeng pada 14 Agustus (tiga hari sebelum HUT RI). Pembacaan sejarah oleh Pembina/Penasehat Yayasan.	Balla Lompoa Bajeng menjadi entitas akuntabilitas manajerial utama.
2025	Peringatan Gaukang ke-80. Pelaksanaan diestimasikan kembali dilakukan secara terbuka namun sederhana (dibanding 2013-2016). Prosesi inti pengeluaran pusaka dan pengibaran dwibendera tetap menjadi fokus. Dilaporkan hanya tersisa empat hingga enam benda pusaka (keris, puke, Jole Jolea) yang rutin digunakan.	Fokus pada Esensi: Akuntabilitas bergeser pada pelestarian ritual dan narasi sebagai entitas tak berwujud, mengingat ber kurangnya jumlah pusaka fisik dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Namun, kendati akuntabilitas ritual berhasil dilaksanakan secara berkelanjutan, penelitian mengidentifikasi adanya disharmoni praktik akuntansi dalam pengelolaan aset fisik Gaukang. Temuan krusial menunjukkan kegagalan akuntabilitas material aset, terindikasi dari degradasi jumlah benda pusaka sejak periode 2017. Kegagalan ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya pengamanan Yayasan, membuat aset inti yang tersisa rentan terhadap pengambilalihan pribadi berdasarkan nilai prestise individual yang superior dibandingkan nilai komunalnya. Selain itu, hambatan pelaksanaan ritual pada tahun-tahun tertentu 2015 dan 2017 mengindikasikan bahwa keberlanjutan ritual tidak sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, pengelolaan aset Gaukang Tu Bajeng merefleksikan sebuah model di mana keberlanjutan *cultural heritage assets* yang sakral dijamin oleh kapital budaya yang diinvestasikan melalui ritual, meskipun penurunan jumlah benda pusaka, keterbatasan dana, serta perubahan skala pelaksanaan menuntut perhatian lebih dalam menjaga sakralitas dan makna historis Gaukang Tu Bajeng.

Analisis Interaksi Simbolik dalam Praktik Akuntansi Gaukang

Akuntansi *cultural heritage assets* dalam Upacara Gaukang Tu Bajeng beroperasi melalui sistem pertukaran makna dan penegasan simbol, yang jauh lebih krusial bagi keberlanjutan aset daripada laporan keuangan moneter. Temuan menunjukkan bahwa Gaukang dan Istana Balla Lompoa diakui sebagai Simbol Modal Budaya yang menuntut Akuntabilitas Moral dan Spiritual dari keturunan kerajaan, bukan akuntabilitas finansial. Ritual itu sendiri berfungsi sebagai bahasa pelaporan resmi: *Angngaru* (sumpah setia) bertindak sebagai Laporan Kinerja Simbolik tahunan yang dinilai berdasarkan ketulusan pelaksanaannya, sementara pengibaran dwi bendera (Merah Putih dan Jole Jolea) merupakan Laporan Nilai Aset Dwi dimensi yang secara simultan mengakui akuntabilitas kepada otoritas nasional dan otoritas adat.

Pembacaan narasi sejarah pada setiap upacara berfungsi sebagai Jurnal dan *Ledger* Kolektif yang menjaga integritas data historis aset dari waktu ke waktu. Meskipun terdapat kegagalan akuntabilitas fisik yang diakibatkan oleh berkurangnya pusaka karena penyimpanan pribadi, komunitas Bajeng berhasil melakukan negosiasi makna dengan mengalihkan fokus dari aset yang hilang ke nilai sakral ritual yang tersisa. Keberlanjutan aset Gaukang kini dijamin melalui Investasi Komunal Tahunan yang dikapitalisasi sebagai Kapital Budaya, memastikan bahwa aset yang sesungguhnya adalah ritual yang hidup itu sendiri, yang maknanya secara kolektif dipertanggungjawabkan melalui interaksi simbolis.

Akuntabilitas AWB Gaukang Tu Bajeng

Akuntabilitas Aset Warisan Budaya (AWB) dalam konteks Upacara Gaukang Tu Bajeng merupakan konsep yang bertransformasi secara signifikan di bawah lensa Interaksi Simbolik, menjauh dari model akuntansi finansial konvensional. Dalam komunitas Gaukang Tu Bajeng, akuntabilitas tidak dimaknai sebagai kewajiban menyusun laporan keuangan, melainkan sebagai Pertanggungjawaban Simbolis. Pertanggungjawaban ini menekankan pada pemeliharaan kemurnian, keutuhan, dan kepatuhan terhadap makna simbolis yang melekat

pada AWB dan ritual. Aset dianggap telah diakuntabilitaskan jika nilai simbolisnya terpelihara, yang ditandai dengan pelaksanaan *Pattuntung* (tuntunan adat) secara sempurna.

Arah akuntabilitas yang dijalankan oleh pemangku adat (*Puang* dan *Gallarang*) memiliki dua dimensi utama. Secara Vertikal, akuntabilitas diarahkan kepada Leluhur dan kekuatan spiritual yang diyakini menjaga AWB. Pertanggungjawaban ini diwujudkan melalui kesempurnaan ritual, yang bertujuan untuk menjaga harmoni kosmik dan menghindari bencana atau musibah adat. Secara Horizontal, akuntabilitas diarahkan kepada masyarakat adat, yang diwujudkan melalui ketertiban sosial, kepastian hukum adat, dan upaya menjaga keberlanjutan tradisi. Jika ritual berhasil dan komunitas sejahtera, itu menjadi bukti bahwa pemangku adat telah berhasil mempertanggungjawabkan amanah leluhur kepada masyarakat.

Akuntabilitas Simbolis memerlukan mekanisme pengukuran kinerja yang bersifat kualitatif dan non-finansial. Kinerja tidak diukur berdasarkan efisiensi biaya, tetapi berdasarkan dampak sosial dan spiritual dari pemeliharaan AWB. Pengukuran keberhasilan akuntabilitas didasarkan pada Indikator Kinerja Non-Finansial yang terinternalisasi dalam keyakinan kolektif. Indikator utama adalah Keberhasilan Ritual, yang dilihat dari kelancaran prosesi, kelengkapan sesajen, dan tanpa adanya kesalahan fatal yang dapat memicu *pammali* (malapetaka). Indikator sekunder adalah Kesejahteraan Komunitas (panen yang melimpah, kesehatan, dan ketenangan sosial) setelah Upacara Gaukang dilaksanakan. Dalam kerangka Interaksi Simbolik, indikator-indikator ini menjadi *feedback* kolektif yang dikonstruksi secara sosial untuk menilai tanggung jawab pengelola.

Aset Inti (Gaukang Tu Bajeng) berfungsi sebagai Media Akuntabilitas itu sendiri. Keutuhan fisik benda pusaka dan terjaganya tempat-tempat sakral (Balla lompoa) diinterpretasikan secara simbolis sebagai bukti bahwa pengelola telah menjalankan tugas pemeliharaan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, kerusakan atau kehilangan benda pusaka diyakini tidak hanya sebagai kegagalan fisik, tetapi sebagai kegagalan akuntabilitas simbolis yang mengindikasikan kelalaian dalam menjaga amanah dan dapat mendatangkan konsekuensi spiritual bagi komunitas.

Mekanisme pelaporan dan pengungkapan akuntabilitas diatur melalui ritual dan peran sosial pemangku adat, menggantikan formalitas dokumen tertulis. Upacara Gaukang Tu Bajeng secara keseluruhan berfungsi sebagai Laporan Akuntabilitas Tahunan yang komprehensif. Melalui prosesi yang terbuka dan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh komunitas, pemangku adat secara simbolis 'melaporkan' bahwa seluruh aset telah terpelihara, aturan adat telah ditaati, dan hubungan vertikal dengan leluhur telah diperbarui. Komunitas menjadi auditor melalui pengamatan kolektif terhadap prosesi dan hasilnya (indikator kesejahteraan).

Konsep *pengungkapan* dalam akuntansi diwujudkan melalui Transparansi Tindakan Ritual. Pemangku adat (*Anrong Guru*) memastikan bahwa setiap langkah ritual dilakukan secara terbuka di hadapan komunitas, sesuai dengan *Pattuntung*. Transparansi ini menegaskan bahwa penggunaan sumber daya (baik benda maupun waktu) ditujukan semata-mata untuk menjaga nilai simbolis aset, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan mengukuhkan legitimasi mereka sebagai pengelola AWB yang bertanggung jawab.

Keberlanjutan AWB Gaukang Tu Bajeng

Konsep keberlanjutan Aset Warisan Budaya (AWB) dalam konteks Gaukang Tu Bajeng tidak hanya mencakup pelestarian fisik, tetapi juga bergantung pada kemampuan komunitas untuk terus mereproduksi dan mempertahankan makna simbolis aset tersebut. Pendekatan interaksi simbolik menunjukkan bahwa keberlanjutan muncul dari interaksi sosial berkelanjutan yang menghasilkan kapital simbolik berupa status, kehormatan, dan kohesi sosial yang tak ternilai. Proses penting dalam menjaga keberlanjutan adalah reproduksi

makna, di mana setiap pelaksanaan upacara menjadi sarana kolektif untuk menghidupkan kembali simbol-simbol warisan budaya. Partisipasi dalam ritual, seperti menyentuh pusaka atau mendengarkan sejarah lisan, memungkinkan generasi baru memaknai ulang simbol tersebut agar tetap relevan secara sosial dan spiritual.

Keberlanjutan AWB juga dipelihara melalui pengendalian internal berbasis adat, yaitu Pattuntung yang mengatur pemeliharaan, penggunaan, dan sanksi terhadap pelanggaran. Ketaatan pemangku adat seperti *Puang* dan *Anrong Guru* menjamin konsistensi interaksi simbolik serta menjaga keaslian makna aset dari pengaruh luar, yang berfungsi sebagai bentuk akuntansi non-finansial dalam pengelolaan aset budaya. Proses pewarisan dan transfer makna dilakukan melalui pembelajaran langsung antar generasi, memastikan bahwa AWB tidak hanya dianggap sebagai benda kuno, tetapi juga sebagai pengetahuan hidup yang mengandung nilai akuntabilitas simbolik.

Namun, keberlanjutan ini menghadapi tantangan modern berupa erosi makna simbolis akibat modernisasi, migrasi, dan budaya populer yang melemahkan keterlibatan generasi muda. Untuk mengatasinya, komunitas perlu melakukan adaptasi interaksi simbolik, seperti melibatkan kaum muda, memanfaatkan media modern tanpa mengurangi kesakralan ritual, dan berdialog dengan pemerintah untuk menjaga pengakuan adat. Adaptasi yang seimbang antara akuntabilitas vertikal (spiritual) dan horizontal (sosial) menjadi kunci agar AWB Gaukang Tu Bajeng tetap lestari dan relevan dalam konteks budaya modern.

Pembahasan dan Implikasi Teoretis

Dalam kerangka interaksionisme simbolik, praktik akuntansi dalam tradisi Gaukang dapat dipahami melalui tiga konsep utama yang diajukan Mead dan Blumer, yaitu *mind*, *self*, dan *society*. Pertama, *mind* tercermin dalam proses reflektif para aktor adat dalam menafsirkan makna pusaka dan ritual sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Kedua, *self* muncul dalam peran individu sebagai bagian dari struktur adat, di mana identitas sebagai pengelola atau anggota masyarakat terbentuk melalui keterlibatan aktif dalam praktik ritual dan akuntansi. Ketiga, *society* tampak jelas dalam mekanisme kolektif pelaporan keuangan dan partisipasi masyarakat, yang membentuk struktur sosial yang mendukung keberlanjutan tradisi (Blumer, 1969; Mead, 1934).

Literatur sebelumnya banyak menekankan akuntabilitas sebagai mekanisme formal yang berorientasi pada transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi eksternal (O'Dwyer & Unerman, 2008; Jacobs & Walker, 2004). Namun, dalam konteks Gaukang, akuntabilitas mencakup dimensi sakral dan sosial yang melekat dalam sistem kepercayaan masyarakat. Proses pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada entitas manusia, tetapi juga kepada leluhur dan kekuatan transendental yang diyakini menjaga keseimbangan sosial. Hal ini mendukung pandangan Laughlin (1996) dan Roberts (1991) bahwa akuntabilitas dapat bersifat dialogis dan simbolik, di mana komunikasi sosial dan nilai budaya menjadi pusat praktik pertanggungjawaban.

Dari perspektif akuntansi untuk *cultural heritage assets*, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi konvensional tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan makna budaya dan spiritual yang melekat pada pusaka dan ritual Gaukang. Sebaliknya, masyarakat Bajeng mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan yang kontekstual, berakar pada nilai lokal dan mekanisme sosial. Pendekatan ini selaras dengan temuan Adhikari dan Jayasinghe (2017) yang menekankan pentingnya memahami akuntansi dalam konteks sosial-budaya lokal, serta Kuruppu dan Lodhia (2010) yang menunjukkan adanya bentuk hibriditas antara sistem lokal dan modern dalam praktik akuntansi di masyarakat adat.

Keberlanjutan *cultural heritage assets* tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial dan simbolik yang mendukungnya. Keberlanjutan bukan hanya soal pelestarian fisik aset, tetapi juga pewarisan nilai, pengetahuan, dan struktur kelembagaan adat. Dalam hal ini, akuntansi berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan menjaga legitimasi sosial dan spiritual yang diperlukan untuk keberlangsungan tradisi (Carnegie & West, 2005; Biondi & Lapsley, 2014).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik akuntansi terhadap *cultural heritage assets* dalam konteks Upacara Gaukang Tu Bajeng, dengan menggunakan pendekatan interaksionisme simbolik sebagai alat analisis untuk mengungkap makna sosial di balik praktik akuntansi tradisional. Temuan menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam masyarakat Bajeng tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga berperan sebagai media interaksi sosial, simbolik, dan spiritual yang memperkuat akuntabilitas serta keberlanjutan warisan budaya.
- 2) Melalui analisis simbolik, pusaka dan ritual Gaukang memiliki makna sakral yang melampaui nilai artefaktual; keduanya menjadi simbol penghubung antara masyarakat, leluhur, dan transendental, yang memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat Bajeng.
- 3) Proses akuntansi dalam pengelolaan *cultural heritage assets* mencerminkan tiga dimensi interaksi simbolik *mind*, *self*, dan *society* yang membentuk struktur pertanggungjawaban kolektif dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Akuntabilitas diwujudkan dalam dua bentuk utama, yaitu akuntabilitas sosial kepada masyarakat melalui pelaporan terbuka dan partisipatif, serta akuntabilitas sakral kepada entitas spiritual melalui praktik ritual yang berbasis pada nilai kepercayaan dan penghormatan adat. Keberlanjutan warisan budaya tidak hanya ditentukan oleh pelestarian fisik pusaka, tetapi juga oleh transfer nilai, pengetahuan adat, dan kesinambungan struktur kelembagaan yang memastikan eksistensi spiritual dan sosial dari pusaka tetap hidup di masyarakat Bajeng.

Saran

Saran praktis ini dibagi untuk tiga pemangku kepentingan utama guna memastikan keberlanjutan Warisan Budaya Gaukang Tu Bajeng. Untuk Komunitas Adat dan Pemuka Adat Bajeng, langkah mendesak adalah segera menguatkan dan mendokumentasikan praktik akuntabilitas komunal melalui inisiatif Pencatatan Naratif Ritual Kolektif, yang berfungsi sebagai *Laporan Akuntabilitas Sosial dan Budaya* terstruktur untuk diwariskan kepada generasi muda, mencakup deskripsi peran dan kesaksian kolektif dalam ritual, bukan hanya transaksi moneter.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gowa, didorong untuk memfasilitasi keberlanjutan aset dan mengintegrasikan kearifan lokal dengan membentuk Program Kemitraan Konservasi Berbasis Nilai Lokal, di mana dukungan pendanaan harus disesuaikan dengan indikator *non-finansial* yang ditetapkan oleh adat, serta mengintegrasikan narasi akuntabilitas budaya Bajeng ke dalam materi promosi untuk mencegah komodifikasi nilai sakral.

Terakhir, Lembaga Pendidikan dan Akademisi disarankan untuk memperkaya kurikulum dan metodologi penelitian dengan mengembangkan Modul "Akuntansi Kearifan Lokal", yang menggunakan kasus Gaukang untuk mengajarkan bahwa simbol dan interaksi sosial adalah kunci bagi sistem akuntabilitas *cultural heritage assets*, mendidik calon peneliti untuk menghargai mekanisme pertanggungjawaban unik yang melampaui kerangka akuntansi standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, I. D. G., Dewi, N. M. A. S., & Mardika, I. N. (2025). Tri Hita Karana and financial governance in Balinese communities. *Bali Journal of Accounting Studies*, 12(1), 44–59.
- Arfah, M. D. (1995). *Sejarah perjuangan bangsa di daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aryawati, I. A. A., Suardikha, I. M. S., & Sudana, I. P. (2023). Activity-based costing dalam perhitungan biaya tradisi budaya. *Jurnal Akuntansi Tradisional*, 4(2), 101–117.
- Aversano, N., Christiaens, J., & Manes Rossi, F. (2020). IPSAS and heritage assets: Critical issues and future prospects. *Accounting Forum*, 44(3), 267–285. <https://doi.org/10.1080/01559982.2020.1784825>
- Bambagiotti-Alberti, M., Cecchi, C., & Ciampa, F. (2016). Cultural heritage and sustainable development: Accounting and management challenges. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 6(2), 140–153. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-05-2015-0021>
- Barton, A. D. (2000). Accounting for public heritage facilities: Assets or liabilities of the government? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(2), 219–236. <https://doi.org/10.1108/09513570010323594>
- Bleibleh, S., & Awad, J. (2020). Collective memory and social cohesion through cultural heritage conservation. *Cities*, 101, 102692. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102692>
- Carnegie, G. D., & Wolnizer, P. W. (1995). The financial value of cultural, heritage and scientific collections: An accounting fiction. *Australian Accounting Review*, 5(1), 31–47. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.1995.tb00004.x>
- Cerreta, M., & Giovane di Girasole, E. (2020). Cultural heritage for local sustainable development: Spatial decision support system for historical landscape management. *Sustainability*, 12(3), 1028. <https://doi.org/10.3390/su12031028>
- Clark, K. (2006). Capturing the public value of heritage: The scope for new approaches. *International Journal of Heritage Studies*, 12(4), 321–333. <https://doi.org/10.1080/13527250600821702>
- Cole, S. (2008). *Tourism, culture and development: Hopes, dreams and realities in Eastern Indonesia*. Channel View Publications.
- Dana, I. M., & Adnyana, I. B. G. (2025). Tradisi kolektif dan akuntabilitas sosial dalam upacara Bali. *Jurnal Akuntansi Budaya*, 3(1), 50–66.
- Ellwood, S., & Greenwood, M. (2016). Accounting for heritage assets: The development of financial reporting standards in the UK. *Financial Accountability & Management*, 32(3), 264–286. <https://doi.org/10.1111/faam.12088>
- Hasan, M., Nur, A., & Syamsuddin, R. (2022). Kearifan lokal sebagai basis standar budaya kerja komunitas. *Jurnal Budaya dan Akuntansi Lokal*, 1(1), 77–90.
- Hooper, K., Kearins, K., & Green, R. (2005). Knowing “the price of everything and the value of nothing”: Accounting for heritage assets. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(3), 410–433. <https://doi.org/10.1108/09513570510600733>
- Hopwood, A. G. (1988). Accounting and organizational change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(2), 7–17. <https://doi.org/10.1108/09513578810131502>
- Ikhsano, F., Prasetyo, A., & Widodo, Y. (2024). Symbolism and public legitimacy in Southeast Asian music industry. *Asian Cultural Studies Review*, 7(2), 144–163.
- Ilyas, H., Pattinama, P., & Tuhumury, M. (2023). Akuntansi adat sebagai sarana akuntabilitas ritual. *Jurnal Akuntansi Nusantara*, 9(1), 33–47.
- Kusumaningtyas, D. (2025). Simbol dan interaksi dalam identitas budaya generasi muda perkotaan. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 11(2), 215–232.

- Lestari, A. (2023). Akuntansi dalam perspektif budaya: Studi teoretis. *Jurnal Akuntansi dan Sosial*, 10(2), 165-179.
- Li, Y., Wang, N., & Wang, L. (2019). Reconstructing local identity: The role of heritage and tourism. *Tourism Geographies*, 21(3), 503–526.
<https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1588345>
- Ramadhan, P., Sari, N. P., & Wibawa, K. (2025). Akuntabilitas sosial dalam ritual komunitas lokal. *Jurnal Akuntansi dan Kebudayaan*, 2(3), 88–103.
- Ranasinghe, R., & Cheng, C. (2018). Commodification and hybrid lives: Cultural tourism in a postmodern age. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 16(3), 211–228.
<https://doi.org/10.1080/14766825.2017.1417467>
- Roders, A. P., & van Oers, R. (2011). Bridging cultural heritage and sustainable development. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 1(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/20441261111129902>
- Sacco, P. L., Blessi, G. T., & Nuccio, M. (2014). Culture as an engine of local development processes: System-wide cultural districts. *Growth and Change*, 45(4), 544–570.
<https://doi.org/10.1111/grow.12054>
- Shafira, R. (2024). Digital fandom and symbolic interaction: The case of ARMY. *Journal of Cultural Communication*, 5(1), 78–94.
- Shinta, T. (2024). Teori interaksionisme simbolik dalam kajian akuntansi budaya. *Jurnal Teori Akuntansi Indonesia*, 6(2), 100–118.
- Sopanah, S., Marwa, N., & Indrasari, R. (2023). Kearifan lokal dan tata kelola keuangan komunitas. *Jurnal Akuntansi Lintas Budaya*, 3(1), 60–75.
- Sopanah, S., Suryani, E., & Wahyuni, D. (2024). Akuntansi sebagai sarana solidaritas sosial: Studi kultural. *Jurnal Akuntansi dan Masyarakat*, 5(1), 45–62.
- Yamashita, S. (1994). *Manipulating tradition: Tourism, the mass media, and the reproduction of culture in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.